

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada jaman sekarang dimana tingkat kebutuhan hidup semakin tinggi, maka tiap individu harus bekerja keras dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka seseorang dapat bekerja pada orang lain maupun membuka usaha sendiri. Ketika akan memulai suatu usaha maka dibutuhkan sejumlah dana. Dana tersebut dapat diperoleh melalui dana pribadi maupun melalui pinjaman, baik pinjaman dari kerabat maupun dari badan usaha. Salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman dana bagi masyarakat ialah koperasi. Menurut Muljono (2012:01) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi yang memberikan pinjaman disebut sebagai koperasi simpan pinjam. Menurut Muljono (2012:05) koperasi simpan pinjam memiliki manfaat antara lain, memberi kemudahan bagi anggotanya untuk memperoleh modal usaha, memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha, mengembangkan usaha anggota koperasi dan meniadakan praktek rentenir. Menurut Muljono (2012:121) koperasi simpan pinjam sebagai badan usaha yang memberikan

pinjaman memiliki banyak pesaing antara lain ialah sesama Koperasi Simpan Pinjam, Bank Perkreditan Rakyat, Bank konvensional, Koperasi Syariah, Bank Syariah dan Pemerintah. Dengan banyaknya pesaing, maka Koperasi Simpan Pinjam harus mampu melakukan inovasi agar tujuan koperasi dapat tercapai. Semua badan usaha memiliki suatu sistem pengendalian internal dan di dalam sistem tersebut terdapat aktivitas pengendalian sebagai upaya agar usaha tersebut terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Menurut Rama dan Jones (2009:132) sistem pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Hall (2006:190) aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi resiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Setiap badan usaha pasti memiliki sistem pengendalian internal untuk melindungi aset yang dimilikinya. Sistem pengendalian internal memiliki tujuan. Menurut Hall (2006:181) ada empat tujuan umum dari sistem pengendalian internal, yaitu: menjaga aset, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Salah satu koperasi yang ada di Surabaya ialah Koperasi Karyawan Sampoerna. Koperasi Karyawan Sampoerna ini berdiri secara terpisah dari P.T H.M Sampoerna, artinya ialah Koperasi Karyawan Sampoerna ini tidak mendapat bantuan dana dari P.T H.M Sampoerna melainkan hanya mendapat bantuan berupa data dari P.T H.M Sampoerna. P.T H.M Sampoerna memberikan bantuan data pada Koperasi Karyawan Sampoerna, karena koperasi ini melayani para karyawan yang bekerja pada P.T H.M Sampoerna yang merupakan anggota koperasi. Koperasi Karyawan Sampoerna juga memberikan pinjaman bagi para anggotanya, sedangkan untuk karyawan yang bekerja pada Koperasi Karyawan Sampoerna sendiri tidak diperbolehkan menjadi anggota koperasi dan tidak dapat melakukan pinjaman pada koperasi. Dari data yang ada pada Koperasi Karyawan Sampoerna pada tahun 2011 jumlah anggota pada Koperasi Karyawan Sampoerna ini ialah 6.144 anggota. Pengendalian dari Koperasi Karyawan Sampoerna dalam proses pemberian pinjaman ini ialah koperasi hanya melayani para anggotanya yang merupakan karyawan dari P.T H.M Sampoerna, hal ini dilakukan agar pihak koperasi dapat mengetahui latar belakang dari anggotanya serta meminimalisir terjadinya penyelewengan oleh anggota yang tidak mengembalikan pinjaman. Selain itu adanya kartu anggota dapat membantu koperasi agar dalam pemberian pinjaman tidak terjadi kesalahan. Pihak koperasi akan dikonfirmasi oleh P.T H.M Sampoerna bila ada karyawan yang berhenti bekerja, sehingga koperasi dapat meminta agar anggota tersebut segera

melunasi pinjamannya. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Karyawan Sampoerna akan disesuaikan dengan gaji yang didapat oleh anggota. Pemberian pinjaman harus disesuaikan dengan gaji yang didapat, agar tidak membebani anggota pada saat pengembalian pinjaman. Anggota dari Koperasi Karyawan Sampoerna merupakan karyawan tetap pada P.T H.M Sampoerna. Apabila bukan karyawan tetap dari P.T H.M Sampoerna, maka orang tersebut tidak dapat menjadi anggota koperasi dan pihak Koperasi Karyawan Sampoerna tidak akan memberikan pinjaman. Tugas akhir ini akan membahas mengenai Koperasi Karyawan Sampoerna yang ada di Surabaya, khususnya di Unit Pelayanan Rungkut 2.

Koperasi Karyawan Sampoerna dibagi menjadi dua unit, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Toko. Koperasi Simpan Pinjam memiliki sepuluh jenis simpanan yang terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan khusus dana cadangan, simpanan khusus, simpanan pendidikan, simpanan hewan qurban, simpanan akhir kumulatif, simpanan akhir tahun, dan simpanan berjangka. Koperasi Simpan Pinjam juga memberikan pinjaman berupa pinjaman regular, pinjaman pendidikan, pinjaman sosial dan pinjaman modal usaha. Sedangkan Koperasi Toko memiliki tiga jenis pinjaman yaitu pinjaman barang pokok, pinjaman sekunder dan pinjaman pembiayaan. Yang dimaksudkan sebagai pinjaman pembiayaan ialah pinjaman berupa emas, sepeda motor, dan barang elektronik lainnya. Koperasi Karyawan Sampoerna memberikan kemudahan kepada para anggotanya dalam melakukan

pinjaman. Para anggota bisa mengajukan pinjaman dengan jenis pinjaman yang diinginkan, bisa berupa pinjaman barang pokok, pinjaman sekunder maupun pinjaman pembiayaan, namun besarnya pinjaman akan ditentukan oleh Kepala Unit. Pemberian pinjaman memiliki batasan pinjaman, untuk pinjaman barang pokok maka anggota akan mendapat pinjaman maksimal sebesar Rp 1.500.000. Untuk pinjaman barang sekunder maka anggota akan mendapat pinjaman maksimal sebesar Rp 3.000.000. Sedangkan untuk pinjaman pembiayaan anggota akan mendapat pinjaman maksimal sebesar Rp 7.000.000. Pinjaman yang diberikan memiliki batasan waktu pelunasan. Pembayaran angsuran pinjaman bisa dilakukan setiap minggu, hal ini dilakukan agar anggota tidak terbebani dengan pelunasan pinjaman. Sistem pembayaran pinjaman dibedakan menjadi dua, yaitu secara tunai dan secara auto debet. Untuk pinjaman barang pokok pembayaran pinjaman dilakukan secara tunai. Sedangkan untuk pembayaran pinjaman sekunder maupun pinjaman pembiayaan dapat dilakukan secara auto debet, melalui bank yang bekerjasama dengan pihak Koperasi Karyawan Sampoerna. Pembayaran pinjaman sekunder serta pinjaman pembiayaan dilakukan secara auto debet, karena akan mempermudah pembayaran pinjaman tersebut. Disamping memberi kemudahan, sistem pembayaran secara auto debet juga memiliki kelemahan, yaitu memungkinkan terjadinya gagal bayar terhadap pinjaman anggota. Hal ini disebabkan karena proses transfer gaji dilakukan oleh P.T H.M Sampoerna dan tidak dilakukan oleh Koperasi Karyawan

Sampoerna, sehingga karyawan dapat mengambil gaji sebelum proses auto debit dilakukan. Dengan menggunakan fasilitas sms banking, para anggota dapat mengetahui gaji yang mereka dapat sudah ditransfer atau tidak. Terjadinya gagal bayar seperti ini perlu mendapat perhatian lebih dari pihak Koperasi Karyawan Sampoerna, agar nantinya proses pinjaman dapat terus berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak (anggota dan koperasi). Pinjaman yang akan diberikan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Koperasi Karyawan Sampoerna. Dalam menjalankan kegiatannya Koperasi Karyawan Sampoerna sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi serta sudah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kegiatannya, pada penelitian ini sistem pengendalian internal perusahaan disesuaikan pada standar pengendalian internal mengacu pada *Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission (COSO)*, namun berfokus pada aktivitas pengendaliannya.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah sistem pengendalian internal pemberian pinjaman pembiayaan pada “Koperasi Karyawan Sampoerna” mengacu pada standar pengendalian internal COSO berfokus pada aktivitas pengendalian.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui apakah sistem pengendalian internal pemberian pinjaman pembiayaan pada “Koperasi Karyawan Sampoerna” mengacu pada standar pengendalian internal COSO berfokus pada aktivitas pengendalian.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Memberikan manfaat dan masukan kepada para pembaca agar dapat mengetahui sistem pengendalian internal pemberian pinjaman pembiayaan pada “Koperasi Karyawan Sampoerna”.

1.4.2. Manfaat Praktik

Memberikan masukan informasi untuk melakukan koreksi serta bahan pertimbangan pada “Koperasi Karyawan Sampoerna” dalam meningkatkan sistem pengendalian internalnya.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

BAB 2: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat penelitian terdahulu yang terkait dengan topik, landasan teori yang berisi konsep teoritis yang relevan dengan rumusan masalah serta kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian meliputi: desain penelitian, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dan saran.